
Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN

Nadia Istamala¹, Nur Azizah², Oki Nurahim³, Daryono Daryono⁴

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email : nadiaistamala888@gmail.com¹, mumtazshop10@gmail.com², okinurahim@gmail.com³, daryono@fisip.unmul.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received 08 Juni 2024

Received in revised form 21 Agustus 2024

Accepted 23 Agustus 2024

Available online 30 Oktober 2024

ABSTRACT

The government plans to relocate the national capital (IKN) to East Kalimantan, a move that was agreed upon by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in early 2022. Despite more than six main considerations, these reasons are not yet sufficient to justify moving the IKN from Jakarta to East Kalimantan. This research evaluates public policy regarding the relocation of the IKN using a qualitative descriptive approach, analyzing the substance and implementation of the policy, as well as examining the responses of stakeholders. The process highlights the pros and cons in terms of preparation, financing, and the economic and socio-ecological impacts of this relocation, while also comparing it to the experiences of other countries. The research categorizes the driving and inhibiting factors of the IKN relocation, which holds strategic potential for economic transformation but must take into account sociological and geographical aspects. Social media, particularly Twitter, plays a significant role in shaping public opinion on the planning process of the IKN relocation. Conducted from March to May 2022, this study uses a qualitative descriptive method with a literature review and data analysis through the Nvivo 12 Plus application, finding that the agenda-setting theory influences public opinion on Twitter regarding the IKN relocation.

Keywords: *National Capital, Social Media, Displacement, Potential.*

Abstrak

Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang telah disepakati oleh DPR RI pada awal 2022. Meskipun terdapat lebih dari enam pertimbangan utama, alasan ini belum cukup untuk menggerakkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, serta meneliti tanggapan para pemangku kepentingan. Proses ini menyoroti pro dan kontra dalam persiapan, pembiayaan, dan dampak ekonomi serta sosial-ekologis dari pemindahan ini, sambil membandingkannya dengan pengalaman negara lain. Penelitian ini mengelompokkan faktor pendorong dan penghambat dalam pemindahan IKN, yang memiliki potensi strategis untuk

Received 08 Juni, 2024; Revised 21 Agustus, 2024; Accepted 23 Agustus, 2024

transformasi ekonomi namun harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan geografis. Media sosial, khususnya Twitter, berperan penting dalam membentuk opini publik mengenai perencanaan pemindahan IKN. Penelitian yang dilakukan dari Maret hingga Mei 2022 ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan analisis data melalui aplikasi Nvivo 12 Plus, menemukan bahwa teori agenda setting mempengaruhi opini publik di Twitter terkait pemindahan IKN.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Media Sosial, Pemindahan, Potensi.

1. PENDAHULUAN

Ibu kota negara memiliki peran yang penting untuk menunjukkan karakter sebuah negara yaitu sebagai simbol kota untuk membedakan fungsi politik, ekonomi, dan budaya serta ibu kota juga sebagai tempat pusat pemerintahan negara yang menunjukkan kekuatan politik [1]. Permasalahannya yaitu ketika sebuah kota mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang melewati batas maksimum maka yang akan terjadi adalah urbanisasi [1]. Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur saat ini menjadi perdebatan intens dan isu hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Gagasan ini sudah muncul sejak era kolonial, terkait dengan masalah kelebihan beban lingkungan di DKI Jakarta. [2]. Upaya tersebut kembali muncul melalui kajian dari Bappenas RI, pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam pidato kenegaraan yang di sampaikan oleh presiden Joko Widodo.

Presiden secara resmi meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk merelokasi ibu kota Republik Indonesia ke wilayah baru di Provinsi Kalimantan Timur, antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara [3]. Banyak sekali faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu mulai dari permasalahan beban kota Bandung, kinerja pemberian pelayanan pemerintah serta pemulihan kota [4]. Alasan lainnya untuk mengurangi ketimpangan, mengembangkan pemerataan dan mengembangkan pusat ekonomi baru, daya dukung dan daya tampung Pulau Jawa terus menurun [5]. Beban DKI Jakarta dianggap sudah melampaui batas untuk dijadikan pusat ibu kota. Jakarta mengalami pencemaran lingkungan seperti limbah-limbah dan sampah yang sangat amat besar, seluruh dunia sudah mengetahui bahwa DKI Jakarta terkenal dengan kemacetannya yang selalu menghiasi di sepanjang jalan raya, kondisi penduduk padat, banyak gedung bertingkat yang sifatnya standar, serta sedikitnya cadangan air bersih [6]. Permasalahan lingkungan di Jakarta saat ini sering terjadi yaitu seperti masalah banjir [7]. Di wilayah Jakarta sistem pengaliran dan sanitasi air buruk, pasokan listrik juga energi yang tidak seimbang, persiapan tata guna lahan yang semakin tak patut lagi di masa yang akan datang [8]. Lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial di wilayah Jakarta juga sudah mendesak [9]. Pejabat khusus Sekretaris Negara Paolo Maldini mengatakan, pemerintah melihat pemindahan ibu kota sebagai usaha pemerataan pembangunan supaya tak terfokuskan di Jawa, menurutnya sudah sejalan dengan visi presiden Jokowi yang dengan sendirinya Indonesia centris dan tidak lagi Jawa centris [10].

Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Timur di pilih untuk di jadikan pusat ibu kota baru salah satunya dikarenakan rendahnya resiko bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, serta tsunami, lokasi Kalimantan Timur berada di tengah-tengah Indonesia serta beradadi dekat perkotaan yang berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda [11]. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur di harapkan mampu mengubah arah pembangunan nasional menjadi lebih merata serta memberikan harapan pemerataan ekonomi agar tidak hanya di wilayah Jawa saja [5]. Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengembangkan enam sektor industri, termasuk jasa kesehatan, farmasi, pendidikan, pariwisata, teknologi bersih (energi surya), serta industri perkerajinan dan inovasi dengan fokus pada prinsip keberlanjutan dan penghijauan [12]. Daerah Penajam Paser Utara diharapkan bisa memperlancar modal, barang dan jasa, serta arus penduduk dari wilayah maju ke wilayah yang terbelakang dan sebaliknya, yang bisa saling memberi pengaruh baik satu dengan yang lain supaya mewujudkan keseimbangan penyusunan daerah untuk ekonomi dan dapat menciptakan hilirisasi SDA di daerah pedalaman [13].

Menurut [14] dalam hal kepemilikan tanah, Penajam Paser Utara dan Samboja saja yang merupakan satu- satunya wilayah di Indonesia ini dimana segala hak kepemilikan tanahnya bisa dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Dari sisi maritim, Kalimantan Timur berbatasan dengan selat Makassar dan laut Sulawesi yang merupakan Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, maka sangat signifikan bagi mata rantai konektivitas, distribusi dan jalur logistik di nusantara, transportasi, serta pelayaran internasional [11]. Di balik faktor-faktor tersebut tentunya masih tetap ada pro dan kontra di hati masyarakat seluruh Indonesia dalam menanggapi pemindahan IKN tersebut, karena sebagian masyarakat masih tetap setuju jika pusat ibu kota tetap di DKI Jakarta dan sebagian masyarakat juga ada yang memilih ibu kota untuk di pindahkan dari DKI Jakarta ke wilayah lain [4]. Selanjutnya yang menjadi bagian dari proses pemindahan IKN yaitu, pada tanggal 10 Maret 2022, presiden Jokowi resmi melantik Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe

*Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN
(Nadia Istamala)*

sebagai wakil kepala Otorita IKN Nusantara periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta [15]. Keduanya dipilih oleh bapak Jokowi karena keduanya di nilai mampu serta diharapkan bisa memimpin proyek besar itu dengan sebaik mungkin di kedepannya. Ibu kota baru tersebut di beri nama Nusantara.

Pemindahan ibu kota juga di tuang ke dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 [13]. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN [16] proyek pemindahan IKN saat ini sudah diatur di dalamnya dengan poin substansi sebagai berikut :

1. Pembentukan Ibu Kota Negara di daerah kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dan badan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan DKI Kota Nusantara.
2. Pembentukan, kekhususan, kedudukan, cakupan wilayah, dan rencana induk.
3. Bentuk, susunan, kewenangan, dan urusan pemerintahan.
4. Pembagian wilayah.
5. Penataan ruang, Pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan dan keamanan.
6. Pemindahan kedudukan lembaga negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional.
7. Pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.
8. Partisipasi masyarakat.

Fenomena tersebut menjadi ramai di bahas di ruang publik terutama media sosial twitter oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, semua memiliki opini masing-masing dalam menanggapi proyek besar tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari media massa terus berinovasi tanpa batas. Melalui fasilitas teknologi, media massa tumbuh sesuai dengan perkembangannya. Banyak sekali media massa yang mengemas berita-berita seperti mediatelevisi, radio, gawai dengan internet, juga melalui koran, buku dan lainnya. Yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu media massa melalui medsos twitter sebagai media agenda setting dalam membahas fenomena proses perencanaan pemindahan IKN yang kemudian memunculkan opini publik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting. Menurut [17] *agenda setting* merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Maxwell McComb dan Donald L. Shaw. Agenda setting adalah sebagai pencipta suatu program atau agenda dan apabila media memasok tekanan terhadap sesuatu peristiwa, media akan mendorong publik atau publik menganggapnya penting [18]. Agenda setting juga di sebut sebagai pengaruh media massa atas khalayak publik serta budaya [19]. Hasil temuan lain, menurut [20] agenda setting adalah keahlian media untuk menciptakan informasi, berita atau rumor agar terlihat signifikan di mata publik serta memberikan pengaruh debat publik. Sedangkan menurut jurnal karya [21] agenda setting adalah rancangan dimana media berita dengan menyajikan berita dengan sistematis, hadir guna mengidentifikasi kejadian isu atau rumor yang perlu dibicarakan dan di bahas publik. Penelitian lain yang terdahulu dalam jurnal karya [22] agenda setting merupakan konsep dimana media berita itu tak sesungguhnya mengubah terhadap pendapat publik, namun menata pemikiran publik terkait sesuatu yang perlu dibicarakan. Yang menjadi kelebihan dari teori ini yaitu bisa digolongkan sebagai teori keabadian atau tak hilang dimakan waktu. Walaupun teori tersebut diperkenalkan di tahun 1972, namun dari sejumlah penelitian yang hendak diulas memperlihatkan keberadaan teori ini bisa dipakai untuk rumor modern di negara-negara lain bahkan mencakup seluruh dunia [23].

Contoh teori agenda setting adalah seperti fenomena proses perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur yang di beritakan oleh media massa serta karena hal tersebut adalah proyek yang besar dan menyangkut kepentingan bersama dalam bernegara maka menjadi pembahasan yang ramai dibicarakan publik akhirnya merembet ke banyak media salah satunya media sosial twitter. Dengan begitu banyak media yang membuat berita terkait pemindahan IKN. Ketika mendapatkan berita tersebut, publik bagaikan berada dalam lokasi peristiwa atau menghadapi peristiwa secara langsung [24]. Selain itu, media informasi dari Malaysia, baik tradisional maupun baru, mempunyai pengaruh yang penting terhadap opini publik. Ketika perpaduan dibuat melalui pokok persoalan yang diamaati media dan publik, hasil menunjukkan bahwa keduanya sama, memperlihatkan bahwa pokok persoalan yang dibuat media itu dapat memberikan pengaruh terhadap apa yang dianggap signifikan oleh masyarakat umum, jenis pokok persoalannya yaitu berupa isu politik, isu ekonomi dan lingkungan, isu kejahatan atau juga isu sosial [21].

Fokus artikel ini adalah untuk melihat opini publik yang muncul karena adanya teori agenda setting yaitu berupa timbulnya suatu fenomena atau isu-isu di berbagai media massa salah satunya twitter seperti

fenomena proses perencanaan pemindahan IKN yang kemudian memunculkan pendapat, ide, kritik yang membangun ataupun pandangan dari suatu pemikiran seseorang yang diperoleh dari diskusi sosial. Menurut penelitian dalam jurnal karya [25] opini publik lebih mengungkapkan perilaku suatu kelompok terhadap isu yang muncul. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian [26] opini publik adalah pandangan, ide, atau perasaan yang dikomunikasikan oleh publik melalui saluran media tertentu. Sedangkan menurut [27] opini publik mengarah pada pendapat bersama dan diperoleh lewat pembahasan yang serius atas suatu masalah yang terjadi. Pendapat yang di sampaikan oleh masing-masing individu tersebut menimbulkan pengaruh opini kepada manusia lain dalam menanggapi suatu isu atau fenomena. Di Indonesia, opini publik sangat penting, karena tanpa memperhatikan opini publik tidak ada pemerintahan yang dapat berhasil, dikarenakan tujuan dari pemerintahan yang sepenuhnya demokratis yaitu kesejahteraan untuk rakyat [25].

Dalam jurnal karya [28] menyatakan 4 tingkatan cara pembentukan opini atau pendapat publik : 1. Perselisihan dengan masalah potensial 2. Para pemimpin politik 3. Menjelaskan individu dan pertimbangan sosial 4. Kesiapan untuk mengungkapkan pendapat pribadi didepan umum. Selain itu, terdapat 3 cara untuk membentuk opini publik, yaitu dengan membeli, maksudnya yaitu untuk memperoleh suara pelanggan atas kesenangan dalam berbelanja alias dikenal dengan istilah monetarisme untuk mendapatkan suara yang mendukung, dengan bujukan yang maksudnya bertujuan untuk mengubah pendapat yang berlawanan menjadi pendapat yang berguna bagi organisasi serta dengan tekanan yang maksudnya yaitu sangat dipengaruhi oleh dampak, prestise atau martabat, pesona pribadi serta berdasarkan posisi dan kekuasaan tertentu [25].

Artikel ini penting untuk ditulis karena memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis opini publik berdasarkan teori agenda setting yang di dapatkan dari fenomena proses perencanaan pemindahan IKN pada media sosial twitter. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah keberadaan teori agenda setting tersebut sesuai dengan data hasil penelitian dengan kata lain apakah teori agenda setting memang berhubungan dengan munculnya opini publik di kehidupan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara adalah fenomena yang telah terjadi di berbagai negara, didorong oleh berbagai alasan seperti desentralisasi, distribusi pembangunan, dan mitigasi masalah perkotaan. Dalam dekade terakhir, penelitian oleh Rukmana [26] dan Litman [27] menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota sering kali bertujuan untuk mengurangi tekanan di kota yang ada, mengatasi ketimpangan pembangunan, dan memperbaiki kondisi lingkungan. Pada awal 2022, pemerintah Indonesia, dengan persetujuan DPR RI, mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, meskipun terdapat lebih dari enam pertimbangan utama, alasan ini dinilai belum cukup kuat untuk merealisasikan pemindahan tersebut.

2.2. Evaluasi Kebijakan Publik

Pendekatan deskriptif kualitatif sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan publik yang kompleks. [28] menekankan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap substansi dan implementasi kebijakan, serta memahami tanggapan para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan publik terkait pemindahan IKN, dengan fokus pada substansi, implementasi kebijakan, dan eksplorasi tanggapan pemangku kepentingan.

2.3. Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota

Pemindahan ibu kota selalu menimbulkan pro dan kontra yang signifikan. Litman [27] dan Cohen dan Kietzmann [29] menyebutkan bahwa manfaat potensial dari pemindahan ibu kota meliputi diversifikasi ekonomi dan efek pengganda. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup masalah pembiayaan, dampak sosial-ekologis, dan risiko kegagalan. Penelitian ini mengulas pro dan kontra dalam persiapan, pembiayaan, serta dampak ekonomi dan sosial-ekologis dari pemindahan IKN, dan membandingkannya dengan pengalaman negara lain.

2.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemindahan Ibu Kota

Berbagai faktor pendorong dan penghambat memengaruhi proses pemindahan ibu kota. Menurut Cohen dan Kietzmann [29], faktor pendorong dapat mencakup potensi transformasi ekonomi dan peningkatan efisiensi pemerintahan, sementara faktor penghambat meliputi tantangan sosiologis dan geografis. Penelitian ini mengelompokkan faktor-faktor tersebut, dengan menekankan bahwa meskipun pemindahan IKN memiliki potensi strategis untuk transformasi ekonomi, aspek sosiologis dan geografis tetap harus diperhatikan.

2.5. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

*Opini Publik Berdasarkan Teori Agenda Setting Pada Proses Perencanaan Pemindahan IKN
(Nadia Istamala)*

Media sosial memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik, khususnya dalam konteks pemindahan ibu kota. McCombs dan Shaw [30] dalam teori agenda setting mengemukakan bahwa media dapat menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Dalam penelitian terbaru, Duggan dan Brenner [30] menunjukkan bahwa platform seperti Twitter sangat efektif dalam memobilisasi opini publik dan diskusi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial, khususnya Twitter, berperan signifikan dalam membentuk opini publik mengenai perencanaan pemindahan IKN. Dengan menggunakan analisis data melalui aplikasi Nvivo 12 Plus, ditemukan bahwa teori agenda setting memengaruhi opini publik di Twitter terkait pemindahan IKN.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang mengarah ke pendekatan kualitatif sederhana melalui alur induktif, selain itu penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam fenomena sosial [29]. Penelitian deskriptif kualitatif mengakui sifat individual dari pengalaman dan persoalan yang berlainan dari para peserta serta secara langsung menyajikan hasil temuan dengan cara yang mirip dengan istilah yang digunakan dalam pertanyaan survei awal, maka dari itu diakui bahwa penelitian deskriptif kualitatif itu paling tepat [30]. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji fenomena serta menjelaskan data dengan detail dan spesifik dari hasil penelitian. Pokok pembahasan fenomena dalam penelitian ini masih terus berjalan serta menyangkut negara dan data-datanya tengah terus bertambah, sehingga harus dilaksanakannya pencarian data secara mendalam melalui penganalisisan dan di tunjukkan ke dalam bentuk kata-kata menjadi sebuah jurnal penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka dalam bentuk tinjauan pustaka, analisis teoritis, serta data yang diperoleh dari portal berita online seperti kompas.com. dan kompasiana beyond blogging, serta media sosial twitter sebagai sumber referensi yang meyakinkan.

Dalam menganalisis opini publik di dalam penelitian ini yaitu melalui medsos twitter. Twitter adalah sebuah media sosial yang mendapatkan banyak minat dan perhatian masyarakat indonesia [31]. Alasan memilih akun media sosial tersebut karena termasuk situs microblogging tertinggi yang memudahkan sebagai media informasi dalam memberitakan berbagai fenomena serta media interaksi secara menglobal dengan manusia lainnya, sehingga dalam mencari data penelitian terkait proses perencanaan pemindahan IKN dapat di cari data secara lengkap dan efisien. Di dalam twitter terdapat fitur hashtag (#) yang dapat diakses serta untuk menemukan tweet terbaru dengan mudah terkait apa yang di sampaikan oleh pengguna twitter di seluruh dunia [27]. Kelebihan lainnya yaitu twitter termasuk media sosial yang memiliki pengguna aktif yang cenderung stabil [2].

Kuatnya pengaruh media sosial dalam mengatur ritme opini publik membuat media sosial semakin diminati oleh kelompok kepentingan (Qadri, 2020). Akan tetapi disamping itu juga, komunikasi yang dilakukan di twitter dalam penyebaran informasi juga dapat menimbulkan cyber war bagi antar pengguna. Sehingga informasi yang disampaikan tidak selalu masyarakat akan pro dengan informasi tersebut, akan tetapi juga akan menimbulkan kontra terhadap informasi yang disampaikan. Tidak heran apabila di Twitter kita sering menjumpai perang kata-kata atau biasa disebut dengan "twitwar" yang bukan hanya terjadi di dunia maya, namun juga akan merambah ke dunia nyata. Walaupun media sosial twitter tidak sebesar pengguna instagram, akan tetapi pengguna instagram tidak memiliki kelebihan twitter yaitu dalam menyampaikan pandangan sosial di media platform. Sedangkan di twitter semua pengguna diberi kebebasan untuk mencutikan. Lalu mengapa tidak Facebook? Facebook sekarang didominasi oleh pengguna yang mayoritas wanita paruh baya. Yang mana tidak memungkinkan memiliki minat dalam menyampaikan pandangan atau kekritisan tentang politik.

Objek penelitian ini yaitu semua informasi terkait proses perencanaan pemindahan IKN di media sosial twitter. Kemudian untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dipakai guna menggali bukti-bukti yang telah lalu yang mengenai fenomena, mengenai manusia atau sekelompok manusia serta mengenai kasus sosial yang begitu bermanfaat akan penelitian kualitatif [32]. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan literatur dan mengumpulkan sumber bukti-bukti atau data melalui jurnal-jurnal, buku, portal berita di website seperti kompas.com dan kompasiana beyond blogging, serta media sosial twitter. Pada akun twitter data di dapatkan dari #IKN, #IbuKotaNusantara, dan #KotaDuniauntukSemua. Tujuan dari metode penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu guna memberikan deskripsi melalui kata-kata yang bersumber dari hasil penelitian terkait judul tersebut.



Gambar 3. Data Pengguna Media sosial traffic Indonesia



Gambar 4. Data opini publik terkait proses perencanaan pemindahan IKN melalui pencarian #KotaDuniauntukSemua pada akun twitter yang di dapat dari aplikasi Nvivo 12 Plus

4.2 Pembahasan

1. Opini Publik Terkait Proses Pemindahan IKN Melalui Media Sosial Twitter

Pengguna media sosial saat ini sudah semakin familiar, semua usia menggunakan media sosial untuk mengakses berbagai informasi yang di inginkan. Media sosial sudah menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat, dimana keberadaan media sosial semakin hari terus berkembang luas [23]. Disitulah muncul yang namanya opini atau pendapat dari pemikiran manusia yang secara otomatis muncul dari suatu fenomena yang di jumpai dari media tersebut. Opini publik lebih mengungkapkan perilaku suatu kelompok terhadap isu yang muncul [25]. Seperti fenomena proses perencanaan pemindahan IKN yang banyak di bahas di twitter dengan berbagai macam opini atau pendapat yang di sampaikan oleh publik.

Opini publik tentang #IKN sering menjadi trending topik di twitter maupun di medsos lain. Seperti pada gambar 1 diatas merupakan data hasil penelitian di twitter melalui pencarian #IKN yang menunjukkan persentase opini terkait proses perencanaan pemindahan IKN dari masing-masing pengguna akun twitter. #IKN di pilih karena merupakan hashtag yang mudah di jumpai banyak tweet dan retweet di dalamnya yang membahas tentang proses pemindahan ibu kota baru, sehingga dengan

tagar tersebut bisa didapatkan dengan mudah fenomena yang akan dicari. Hingga saat ini opini publik dengan #IKN masih terus meningkat di media sosial twitter.

Dilihat dari data hasil penelitian pada gambar 1 diatas, ditemukan sebanyak 1034 referensi dan hanya 4 nama akun dengan jumlah persentase terbanyak yang di analisis peneliti. Dari ke 4 akun tersebut yaitu akun @abangbelneg, @WartaFaktual, @Rismall4, dan @ar_alexramandey. Pertama seperti retweet pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 8:55:45 dengan nama akun Abang Bela Negara (@abangbelneg) memiliki jumlah persentase terbanyak yaitu sebanyak 16,50 % serta jumlah referensi kode 114 dan pencakupan 11,03 %, salah satu tulisan retweetnya yaitu “Pemindahan #IbukotaNegara #IKN Nusantara meningkatkan lapangan pekerjaan #SemangatNusantara” <https://t.co/qbW2KEaxrj>. Selanjutnya tweet pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 9:18:57 dengan nama akun Warta Faktual (@WartaFaktual) memiliki jumlah persentase terbanyak ke dua yaitu sebanyak 7,81 % serta jumlah referensi kode 54 dan pencakupan 5,22 %, salah satu tulisan tweetnya yaitu “Pembangunan IKN Nusantara demi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia #IbukotaNegara #IKN #SemangatNusantara” <https://t.co/qDmvO2XOcu>.

Selanjutnya retweet pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 13:21:36 dengan nama akun Risma II (@Rismall4) memiliki jumlah persentase terbanyak ke tiga yaitu sebanyak 5,07 %, serta jumlah referensi kode 35 dan pencakupan 3,38 %, salah satu tulisan retweetnya yaitu “Dukung penuh pembangunan IKN Nusantara. #IbukotaNegara #IKN #SemangatNusantara” <https://t.co/aitULcgnoy>. Dan yang terakhir retweet pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 1:00:57 dengan nama akun Ramandey, N. Alex (@ar_alexramandey) memiliki jumlah persentase terbanyak ke empat yaitu sebanyak 4,34 % serta jumlah referensi kode 30 dan pencakupan 2,90%, salah satu tulisan retweetnya yaitu “ 27-#Latepost-Masih dlm agnda #ApelKebangsaan Pemuda Lintas Agama, Pembacaan Point Ke-2 Ikrar Kebangsaan oleh Ketum DPN @peradah, Bung I Gede Ariawan. #DPPGAMKI #GAMKI #IKN #GAMKISEIndonesia #PERADAH #DiesNatalisGAMKIKe60Tahun @jokowi @Kiyai_MarufAmin @KemenPU @erickthohir” <https://t.co/X7GxJVPzV0>. Akun-akun tersebut lebih menggiring opini publik agar sepenuhnya mendukung pemerintah terkait proses perencanaan pemindahan IKN supaya pemindahan ibu kota baru bisa berjalan lancar. Pada opini tersebut di sebutkan bahwa harapan masyarakat ingin hidup lebih baik lagi dari segala segi dengan pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur serta bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada saat ini demi Indonesia yang maju dan sejahtera.

Selanjutnya, opini publik tentang #IbuKotaNusantara juga seringkali trending topik di medsos twitter. Hal ini menarik untuk dianalisis dengan aplikasi Nvivo 12 Plus. Dilihat dari data hasil penelitian pada Gambar 2 diatas merupakan data hasil penelitian di twitter melalui pencarian #IbuKotaNusantara yang menunjukkan dalam bentuk gambar terkait opini publik dalam proses perencanaan pemindahan IKN. #IbuKotaNusantara di pilih karena merupakan hashtag dengan isi tweet dan retweet yang terbaru yang membahas tentang proses pemindahan Ibu Kota Nusantara. Hingga saat ini opini publik dengan #IbuKotaNusantara masih terus meningkat di media sosial twitter, walaupun saat ini pada tanggal 25 Mei 2022 mengalami penurunan tetapi motif pembahasannya tetap sama.

Dilihat dari data hasil penelitian pada gambar 2 diatas ditemukan sebanyak 48 referensi. Pertama seperti tweet pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 15:43:22 dengan nama akun tribunkaltim (@tribunkaltim) serta tulisan tweet “IKN Mengusung Konsep Forest City, tapi Tutupan Lahan Hutan Hijau Masih 42 persen, Langkah KLHK #PersemaianMentawir #IKN #IKNNusantara #IbuKotaNegara #IbuKotaNusantara” <https://t.co/dEFIMft8Nq> lewat @tribunkaltim. Akun tersebut menggiring opini publik dengan kalimat mengkritik, namun sifatnya untuk membangun. Disitu disebutkan bahwa dalam menjalankan kinerja untuk menerapkan konsep Forest City di wilayah IKN, KLHK kurang bekerja cepat dalam menggarap konsep kota hutan yang memiliki jasa ekosistem tersebut. Sehingga opini tersebut guna untuk mendorong KLHK dalam menjalankan peran strategisnya yang berfokus terhadap kegiatan lingkungan dengan semaksimal mungkin lagi. Selanjutnya tweet pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 9:52:44 dengan nama akun Anjani, Dewi (@Dewianjani97) serta tulisan tweet “Tidak Ada Tumpang Tindih Tanah Kawasan IKN #ikn #ibukotanusantara #atrbtn #indonesia” <https://t.co/EMbXjR01tk>. Opini pada akun tersebut lebih mendukung terhadap pemerintah dalam pemindahan ibu kota baru, di dalamnya disebutkan bahwa tidak ada tumpang tindih tanah di kawasan IKN, ini berarti Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan pertanahan di wilayah IKN serta dilakukan dengan memberi perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat.

Selain itu, opini publik yang juga sering menjadi trending topik di medsos twitter yaitu dengan #KotaDuniauntukSemua. Gambar 3 diatas merupakan data hasil penelitian di twitter melalui pencarian #KotaDuniauntukSemua yang menunjukkan dalam bentuk gambar terkait opini publik dalam proses perencanaan pemindahan IKN. #KotaDuniauntukSemua di pilih karena merupakan hashtag dengan isi tweet dan retweet yang mudah di jumpai di dalamnya yang membahas tentang proses pemindahan ibu kota baru. Dilihat dari data hasil penelitian pada gambar 3 diatas ditemukan sebanyak 27 referensi. Pertama seperti retweet pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 6:32:36 dengan nama akun IKN_ID (@ikn_id) serta tulisan retweet “Ibu Kota Nusantara dirancang dengan menggunakan konsep Kota Cerdas, mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam tata kelola perkotaan untuk meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan masalah perkotaan #IKN #KotaDuniauntukSemua #Nusantara” <https://t.co/X50w8Oa5YK>. Akun tersebut menggiring opini publik untuk memberi dukungan terhadap proses pembangunan IKN yang mengusung konsep Smart City atau yang di sebut juga kota cerdas. Secara tak langsung, akun tersebut menunjukkan bahwa indonesia sudah berada dalam jalur yang benar dalam memperbaiki pelayanan publik serta memberikan kesejahteraan hidup pada masyarakat melalui konsep kota cerdas yang akan di usung pada proyek IKN kedepannya. Karena posisi klaster pendukung melalui transformasi digital secara bertahap menggantikan peran manusia dalam kehidupan masyarakat industri.

Selanjutnya tweet pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 7:10:59 dengan nama akun Barikade 98 Kaltim (@B98Kaltim) serta tulisan tweet “Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jayalah Bangsa ! #energiterbaik #barikade98 #kawaldemokrasi #jagaindonesia #barikade98bersamarakyat #barikade98jagajokowi #kalimantan Timur #kaltim #ibukotanegarabaru #IKN #KotaDuniauntukSemua #Nusantara” <https://t.co/CCwxmRTMa0>. Pada akun tersebut lebih menggiring opini publik untuk memberi dukungan pada pemerintah terkait proses perencanaan pemindahan IKN demi kejayaan bangsa.

2. Hubungan Teori Agenda Setting dengan Munculnya opini publik

Opini publik dan teori agenda setting memiliki keterkaitan, yaitu ketika media massa membuat atau mengemas berbagai informasi, rumor, isu-isu, atau fenomena berita lalu disampai kepada publik, maka secara otomatis akan memunculkan opini publik [26]. Publik yang menerima informasi dari media akan memberikan opini atau pendapat yang ada pada benak mereka. Opini publik bisa muncul karena adanya teori agenda setting yaitu berupa timbulnya suatu fenomena atau isu-isu di berbagai media informasi, misalnya seperti fenomena proses perencanaan pemindahan IKN di media sosial twitter yang kemudian memunculkan pendapat, keluhan, kritik yang membangun ataupun pandangan dari suatu pemikiran seseorang yang diperoleh dari diskusi sosial [27]. Agenda setting yaitu keahlian media untuk menciptakan informasi, berita atau rumor agar terlihat signifikan di mata publik serta memberikan pengaruh debat publik [20]. Sehingga teori agenda setting dapat dikatakan bahwa media massa adalah pusat realitas dan dapat mentransfer 2 komponen, yaitu informasi dan kesadaran kepada agenda publik [17]. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian dan kesadaran publik terhadap rumor yang dianggap signifikan bagi media massa.

Media massa sebagai pembuat berita atau informasi yang dimana segala isu berita tersebut sudah di seleksi oleh jurnalis untuk di publish lalu setelah publik melihatnya timbulah opini di benak mereka untuk menanggapi segala jenis isu yang beredar. Publik di buat terpengaruh dengan isu-isu yang di buat media agar publik menganggap apa yang di sampaikan media itu sebagai sesuatu yang penting. Media massa memiliki kekuatan untuk memberi pengaruh kepada opini publik. Usaha demi mendapatkan dukungan dari publik dengan cepat menjadi strategi media massa dalam hal kecepatan transmisi pesan [25]. Terdapat 3 bentuk utama media massa dalam mengatur agendanya, yaitu: 1. Media mengulang berita guna memberikan tempat untuk khalayak memahami suatu rumor atau isi berdasarkan pengemasan lewat kata kunci yang spesifik 2. menonjolkan dan membangkitkan penjelasan karakteristik sebuah rumor atau isu 3. media menggunakan banyak instansi pemerintah serta swasta sebagai publik relationship [34].

Salah satu kelebihan media massa dalam teori agenda setting adalah dapat menjangkau publik, media massa memiliki peran untuk mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan, menarik perhatian serta merubah opini dengan tujuan tertentu yang hendak dituju. selain itu, publik selalu memiliki rasa penasaran dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, namun rasa penasaran tersebut tidak dapat mereka dapatkan tanpa media massa [19]. Fungsi dari teori ini adalah bahwa media begitu selektif dalam menyebarkan informasi yang bisa menarik minat masyarakat baik dari segi nilai pemberitaan maupun

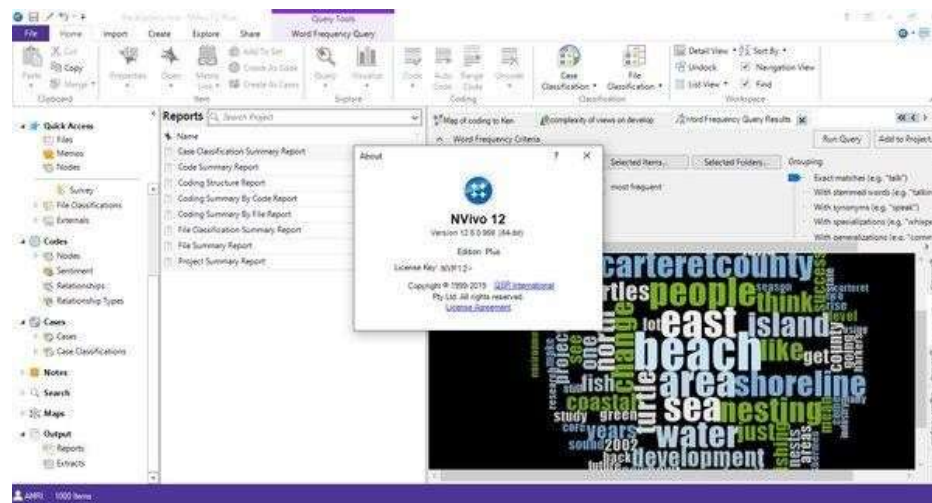
nilai penjualan [35]. Dengan demikian bisa di artikan bahwa menguasai media massa sama seperti menguasai publik. Di Indonesia, contoh fungsi agenda setting dalam pemberitaan seperti fenomena proses perencanaan pemindahan IKN sangat memberikan pengaruh penting terhadap publik. Teori agenda setting berasumsi bahwa media massa dipandang hanya fokus terhadap isu-isu yang dirasa penting oleh publik serta pers dan media dipandang tidak menggambarkan kenyataan yang sebetulnya mereka hanya membentuk dan menyaring isu [23].

Teori agenda setting memiliki kekuatan, yaitu seperti : Publik tidak hanya belajar mengenai rumor atau isu-isu publik melalui media, tetapi juga memahami sejauh apa signifikannya sebuah isu atau topik pembahasan yang diberikan oleh media massa, misalnya: ketika melihat berita di media massa terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara, publik merenungkan atau memahami apa yang di sampaikan oleh aktor-aktor pemerintah yang terkait dengan proyek IKN tersebut. Disitulah media nampakmenetapkan fenomena tentang pemindahan IKN yang menjadi suatu pemberitaan penting. selain itu teori tersebut juga memiliki kekuatan seperti pengaruh media massa berupa kemampuannya untuk mengembangkan pergantian kognitif pada individu, serta kemampuannya untuk menyusun dunia [35]. Di sisi kekuatan tersebut, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu seperti : Sebagian besar berita yang disiarkan hanya memberi untung bagi pemilik modal. Selain itu, teori ini juga bekerja seperti pengadilan, dikarenakan teori agenda setting ini mengasumsikan jika apa yang di informasikan media adalah benar, sementara itu pada kenyataanya tidak tentu selalu benar [35].

Berdasarkan data hasil penelitian pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 di atas, maka dapat di buktikan bahwa keberadaan teori agenda setting yaitu sesuai dengan data hasil penelitian. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya berita-berita atau informasi terkait fenomena proses perencanaan pemindahan IKN di media sosial twitter. Yang dimana media sosial twitter adalah sebagai pencipta informasi tersebut, maka memunculkan berbagai opini publik dengan ditemukan banyaknya informasi terkait perencanaan pemindahan IKN yang beredar luas di medsos twitter dengan berbagai macam opini. Pada data hasil penelitian di atas akun-akun tersebut menganggap bahwa informasi yang di sampaikan pada medos twitter terkait proyek IKN tersebut penting untuk didiskusikan, itu dibuktikan dengan temuan berbagai tweet dan retweet yang membahas diskusi terkait perencanaan pemindahan IKN. Media sosial twitter memberikan pengaruh dan menata pemikiran publik dengan munculnya opini publik. Selain sebagai ilmu pengetahuan, berita atau informasi tersebut juga berpengaruh terhadap pola perilaku, sikap, opini atau pemikiran serta gaya hidup masyarakat. Maka itulah hubungan antara teori agenda setting dengan munculnya opini publik.

4.3 Penggunaan Aplikasi nvivo 12 plus

Penggunaan software dalam mengolah data-data penelitian menjadi sangat penting karena mempercepat proses penelitian (Setiawan et al., 2020). Namun, tidak semua peneliti menguasai software-software penelitian yang banyak berkembang saat ini. Permasalahan ini banyak dialami para peneliti diberbagai institusi pendidikan. Hal ini menyebabkan data-data penelitian kualitatif masih diolah secara manual atau tanpa menggunakan software penelitian. Akibatnya proses penyelesaian penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Harus ada tindakan yang memberikan solusi pada permasalahan ini.. Namun, proses pengolahan data yang dilakukan selama ini masih manual dan belum menggunakan software dalam proses pengolahan datanya. Bahkan roadmap penelitian para peneliti untuk beberapa tahun ke depan masih diseputar penelitian kualitatif oftware NVivo adalah perangkat yang diperuntukkan untuk mengolah data-data penelitian kualitatif, baik hasil wawancara, majalah online, berita online dan sebagainya (Tambun & Sitorus, 2023). Software ini sangat penting untuk dikuasai para peneliti. Untuk menguasai software ini perlu latihan yang intensif dengan pendekatan praktek langsung. Renny (2023) menyatakan bahwa kegiatan pelatihan adalah salah satu opsi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja. Jika ingin meningkatkan kinerja, maka strategi yang bisa ditempuh salah satunya adalah menyelenggarakan pelatihan (Faris, 2020). Pelatihan software NVivo telah terbukti mampu meningkatkan kemandirian para peneliti dalam proses pengolahan data penelitian kualitatif (Sitorus et al., 2023). Skill pengolahan data dengan menggunakan software NVivo dapat mempercepat proses penyelesaian penelitian (Dalkin et al., 2021). Hasilnya akan menjadi lebih efektif dari segi hasil dan lebih efisien dari segi waktu (Tambun, 2022).



Gambar 5. Penggunaan Aplikasi Nvivo 12 Plus

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial twitter adalah sebagai agenda setting dalam membuat atau menciptakan informasi yang menggiring berbagai opini publik terkait proses perencanaan pemindahan IKN. Kemudian informasi yang di buat media tersebut dipublish dan akan memunculkan opini pada publik yang melihatnya. Dalam data hasil penelitian pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 ditemukan bahwa Akun-akun tersebut lebih menggiring opini publik agar sepenuhnya mendukung pemerintah terkait proses perencanaan pemindahan IKN. Serta sebagian akun tersebut menggiring opini publik dengan kalimat mengkritik, namun sifatnya untuk membangun.

Data hasil penelitian menunjukkan, akun-akun tersebut menganggap bahwa informasi yang disampaikan pada medsos twitter terkait proyek IKN tersebut penting untuk didiskusikan, hal itu dibuktikan dengan temuan berbagai tweet dan retweet yang membahas diskusi terkait perencanaan pemindahan IKN. Media sosial twitter memberikan pengaruh dan menata pemikiran publik dengan memunculkan opini publik. Bisa dikatakan bahwa masyarakat terbawadengan berbagai opini yang disampaikan oleh media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan teori agenda setting yaitu sesuai dengan data hasil penelitian.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diusulkan: Saran Akademis

1. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN. Informasi yang akurat dan jelas dapat membantu mengurangi misinformasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi resmi untuk menyebarkan informasi yang terverifikasi.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memanfaatkan media sosial, khususnya Twitter, sebagai platform untuk diskusi terbuka. Dengan mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, pemerintah dapat mendengarkan masukan langsung dari masyarakat dan menjelaskan kebijakan dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membantu menangkal informasi yang tidak benar dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
3. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai literasi media sosial, terutama dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang beredar di platform seperti Twitter. Kampanye literasi digital dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga opini publik yang terbentuk lebih didasarkan pada fakta dan analisis yang akurat.
4. Penelitian ini menunjukkan pentingnya media sosial dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus terus memantau dan menganalisis percakapan di

- media sosial secara berkelanjutan. Data ini bisa digunakan untuk memahami sentimen publik dan menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih efektif.
5. Pemerintah bisa bekerja sama dengan influencer dan opinion leaders di media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Dengan melibatkan mereka dalam kampanye informasi yang mendukung pemindahan IKN, pesan-pesan penting bisa disebarakan lebih luas dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
 6. Pemerintah harus membuka ruang untuk kritik yang membangun dan menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Menanggapi kritik dengan positif dan mencari solusi bersama dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap kebijakan pemindahan IKN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nurhermaya and M. Sugangga, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapat Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat The Influencing Factors of West Java Capital City Relocation Opinion," vol. 10, no. September, pp. 123–131, 2021.
- [2] R. S. Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," J. Reg. Rural Dev. Plan., vol. 4, no. 1, pp. 43–62, 2020, doi: 10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62.
- [3] F. Hadi and R. Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia ' s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective," vol. 17, no. September, pp. 531–557, 2020.
- [4] A. Nurhermaya and M. Sugangga, "Pemindahan Ibu Kota Baru Jawa Barat : Altruisme versus Non-Altruisme The Relocation of West Java Capital City : Altruism versus Non- Altruism," J. Lingkungan Binaan Indones., vol. 9, no. 4, 2020.
- [5] J. Herdiawan, "Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey," J. Dekonstruksi, vol. 3, no. 1, pp. 4–23, 2021, [Online]. Available: <http://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/44>
- [6] L. Wati and S. Yuningsih, "Analisis Framing Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Video 'Dilema Ibu Kota Baru: Selamatkan Jakarta, Korbankan Kalimantan?' Pada Channel Youtube Bbc News Indonesia," Interak. Perad. J. Komun. dan Penyiaran Islam, vol. 1, no. 2, pp. 111–127, 2021, doi: 10.15408/interaksi.v1i2.21322.
- [7] W. T. de Vries, "Urban Greening for New Capital Cities. A Meta Review," Front. Sustain. Cities, vol. 3, pp. 1–12, 2021, doi: 10.3389/frsc.2021.670807.
- [8] M. Nuh, A. Hadiputra, and N. Aisyah, "Pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia : Berdasarkan Perspektif Psikologi," J. Penelit. Pendidikan, vol. 2, no. 3, pp. 292–300, 2021.
- [9] S. D. Saputra, T. G. J, and M. Halkis, "ANALISIS STRATEGI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMIPERTAHANAN (STUDI KASUS UPAYA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI DKI JAKARTA KE KUTAI KARTANEGARA DAN PENAJAM PASER UTARA) STRATEGY ANALYSIS RELOCATION OF THE CAPITAL C," J. Ekon. Pertahanan, vol. 7, no. 2, pp. 192–220, 2021.
- [10] A. Ramadan, "Pemindahan Ibu Kota Dinilai Tak Cukup untuk Ubah Paradigma Jawa- sentris," Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/14585201/pemindahan-ibu-kota-dinilai-tak-cukup-untuk-ubah-paradigma-jawa-sentris> (accessed Feb. 19, 2022).
- [11] S. C. Prima, A. O. Purba, I. W. Yuliarta, and P. Suwarno, "Perubahan tata kelola maritim di wilayah Kalimantan Timur sebagai ibukota baru," Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos., vol. 7, no. 2, pp. 408–420, 2020.
- [12] C. Limas, O. Setyaningsih, O. Putriani, and I. Fauzi, "Jurnal Penelitian Transportasi Laut," J. Penelit. Transp. Laut, vol. 21, pp. 71–82, 2021, [Online]. Available: [file:///C:/Users/X/Covid 19/Downloads/Analisis_Keberlanjutan_Angkutan_Umum_Penumpang_Ber.pdf](file:///C:/Users/X/Covid%2019/Downloads/Analisis_Keberlanjutan_Angkutan_Umum_Penumpang_Ber.pdf)

- [13] W. C. Adinugroho, L. B. Prasetyo, C. Kusmana, and H. Krisnawati, "Menelusuri Kualitas Lingkungan Ibu Kota Baru Indonesia dan Sekitarnya," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 950, no. 1, pp. 0–10, 2022, doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012077.
- [14] D. I. K. Mujiono and U. W. Sagena, "Peluang Kerja Sama Internasional dalam Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia Peluang Kerja Sama Internasional dalam Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia," *J. Stud. Int. INTERDEPENDENSI*, no. 01, pp. 13–22, 2020.
- [15] D. E. Nugraheny, "Sah, Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala- Wakil Kepala Otorita IKN 2022-2027," *Kompas.com*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/15382731/sah-jokowi-lantik-bambang-susantono-dhony-rahajoe-sebagai-kepala-wakil> (accessed Mar. 10, 2022).
- [16] Undang-undang (UU) tentang Ibu Kota Negara. 2022.
- [17] V. K. M. Putri, "Teori Agenda Setting dalam Komunikasi Massa," *kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/14/100000469/teori-agenda-setting-dalam-komunikasi-massa?page=all> (accessed Dec. 14, 2021).
- [18] M. A. Sofyan, P. Laksono, and M. Chabibi, "Pancor Dalam Membentuk Opini Publik Pilkada Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *J. Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekon.*, vol. 5, no. 2, pp. 57–73, 2020.
- [19] F. P. Purwandini, "ANALISIS ISI OPINI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH ANALYSIS OF PUBLIC OPINION CONTENT TOWARDS THE CENTRAL GOVERNMENT POLICY IN SOCIAL , ECONOMIC AND CULTURAL SECTOR," *J. KOMUNIKASI, MEDIA DAN Inform.*, vol. 6, no. 1, pp. 65–74, 2017.
- [20] C. P. Kee, A. Salman, and K. S. N. M. R. M. Yaakop, "Fungsi Agenda Setting Surat Kabar Bahasa Inggris selama 13 th Pemilihan Umum Peran Koran Inggris di Malaysia," *J. Komun. Malaysia*, vol. 33, no. 2, pp. 27–39, 2017.
- [21] R. Ali and K. A. Manan, "SIFAT BLOGOSFER POLITIK DI MALAYSIA," *e-JURNAL Penyelid. DAN Inov.*, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [22] A. Salman, N. M. M. A. M. Salleh, and M. N. S. Ali, "MEDIA SOSIAL DAN PENGATURAN AGENDA : IMPLIKASI TERHADAP AGENDA POLITIK," *J. Komun. Malaysia*, vol. 32, no. 1, pp. 607–623, 2016.
- [23] I. B. Hadi S, E. P. Kurniawan, and Irwansyah, "Agenda Setting Dalam Isu - Isu Kontemporer Di Seluruh Dunia," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 105–119, 2021, doi: 10.47233/jteksis.v3i1.188.
- [24] R. Dina, "Teori Agenda Setting: Studi Kasus Pemberitaan Mafia Tanah ART Artis Nirina Zubir," 2021.
- [25] *Kompasiana Beyond Blogging*, 2021. <https://www.kompasiana.com/roudotuddina1876/619b091b06310e57460f5572/teori-agenda-setting-studi-kasus-pemberitaan-mafia-tanah-art-artist-nirina-zubir?page=all#section1> (accessed Nov. 22, 2021).
- [26] M. Rusi, E. Ujiantuti, and L. Nahar, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB," *J. Syntax Transform.*, vol. 1, no. 9, pp. 632–640, 2020, doi: 10.46799/jst.v1i9.129.
- [27] R. Kornianan, "Opini publik media massa terhadap masalah penghindaran pajak: perbandingan Indonesia dan Irlandia," *PROfesi Humas J. Ilm. Ilmu Hub. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 237, 2020, doi: 10.24198/prh.v4i2.20108.
- [28] A. B. M. Alkatiri, Z. Nadiah, and A. N. S. Nasution, "OPINI PUBLIK TERHADAP PENERAPAN NEW NORMAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER," *Cover. J. Strateg. Commun.*, vol. 11, no. 1, pp. 19–26, 2020.
- [29] D. N. U. R. Asih and M. Rosit, "Opini Publik di Media Sosial : Analisis Isi Opini Kandidat Ahok- Djarot dan Anies-Sandi di Twitter," *Cover. Strateg. Commun.*, vol. 2, no. Maret, pp. 46–56, 2018.
- [30] W. Yuliani, "Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier," *Quanta*, vol. 2, no. 2, pp. 83–91, 2018, doi: 10.22460/q.v2i1p21-30.642.

- [31] kualitatif L. Doyle, C. McCabe, B. Keogh, A. Brady, and M. McCann, "Ikhtisar desain deskriptif dalam penelitian keperawatan," *J. Res. Nurs.*, vol. 25, no. 5, pp. 443–455, 2020, doi: 10.1177/1744987119880234.
- [32] O. U. M. Bus and A. Riyani, "Analisis Trending Topic di Twitter : # NTTBerduka Pada Studi Kasus # BanjirBandang di NTT 2021 Trending Topic Analysis on Twitter : # NTTBerduka in the # BanjirBandang Case Study in NTT 2021," *Din. Sos. Budaya*, Vol, vol. 23, no. 2, pp. 284–291, 2021.
- [33] A. M. Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 2017th ed. Jakarta: Kencana, 2014. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- [34] S. Tambun, "Peningkatan Kemampuan Melakukan Riset Kualitatif dengan Menggunakan Software NVivo 12 Plus di LAN Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda," *J. Pemberdaya. Nusant.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2021, [Online]. Available: http://books.google.com.co/books?id=iaL3AAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:Market+rese arch+in+Practice+inauthor:hague&hl=&cd=1&source=gbs_api%0Apapers3://publication/uuid/4EEA28E9-41A0-4677-9426-B552915D62F%0Ahttps://doi.org/10.1080/23311886.2019.16
- [35] S. Valenzuela and M. McCombs, *The Agenda-Setting Role of the News Media*, 3rd ed. London: Routledge, 2019. doi: 10.4324/9780203710753-10.
- [36] E. Y. Ritonga, "Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi," *J. SIMBOLIKA Res.Learn. Commun. Study*, vol. 4, no. 1, p. 32, 2018, doi: 10.31289/simbolika.v4i1.1460.